

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327 Situs: www.setneg.go.id

Nomor

: B-21939/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.04.01/10/2017 Jakarta, 23 Oktober 2017

Sifat

: Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal

: Penyampaian Tawaran Program Master dari Pemerintah Singapura Tahun 2017

Yth.

(daftar terlampir)

di Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan tawaran untuk mengikuti pendidikan master di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura untuk tahun akademik yang akan dimulai pada Agustus 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program	Persyaratan	Durasi
1.	Master in International Affairs (MIA)	<ul> <li>Mahir dalam Bahasa Inggris.</li> <li>Melampirkan tiga surat rekomendasi (reports of reference).</li> <li>Melampirkan personal statement, maksimal 500 kata.</li> <li>Melampirkan satu karya tulis ilmiah, maksimal 2000 kata.</li> </ul>	2 tahun
2.	Master in Public Policy (MPP)	<ul> <li>Mahir dalam Bahasa Inggris.</li> <li>Melampirkan dua surat rekomendasi (reports of reference).</li> <li>Memiliki dua hingga lima tahun pengalaman kerja.</li> <li>Menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik.</li> </ul>	2 tahun
3.	Master in Public Administration (MPA)	<ul> <li>Mahir dalam Bahasa Inggris.</li> <li>Melampirkan dua surat rekomendasi (reports of reference).</li> <li>Memiliki minimal lima tahun pengalaman kerja.</li> <li>Menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik.</li> </ul>	1 tahun
4.	Master in Public Management (MPM)	<ul> <li>Mahir dalam Bahasa Inggris.</li> <li>Melampirkan dua surat rekomendasi (reports of reference).</li> <li>Memiliki pengalaman kerja lebih dari sepuluh tahun dan memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik.</li> <li>Merupakan pejabat senior prefesional.</li> </ul>	1 tahun (1 semester akan dilaksanakan di John F. Kennedy School of Government, Harvard University atau School of International and Public Affairs, Columbia University)



Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327 Situs: www.setneg.go.id

-2-

Seluruh pendidikan master tersebut akan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris dan terbuka bagi seluruh pegawai yang berusia minimal 25 tahun. Biaya sehubungan dengan keikutsertaan pendidikan master tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Singapura. Batas waktu pendaftaran adalah 31 Desember 2017.

Informasi lengkap mengenai pendidikan master tersebut dapat mengakses secara online www.lkyspp.nus.edu.sg/admissions dan diharapkan agar calon peserta dapat menyampaikan berkas pencalonan kepada kami untuk proses endorsement sebagai calon resmi dari Pemerintah Indonesia, paling lambat tanggal 27 Desember 2017.

Untuk proses endorsement, selain berkas persyaratan sesuai pendidikan, berkas penunjang yang juga dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

- 1. Online application form.
- 2. Transkrip akademik.
- 3. Daftar Riwayat Hidup dalam Bahasa Inggris.
- 4. Satu buah foto berwarna ukuran 4x6 cm.
- 5. Medical Report yang ditandatangani oleh dokter yang berwenang.
- 6. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku.

Adapun seluruh berkas persyaratan agar dikirimkan dengan melampirkan surat pengantar/rekomendasi dari focal point masing-masing instansi. Untuk lebih jelasnya, terlampir kami sampaikan informasi, persyaratan dan prosedur rinci mengenai program dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri

Rika Kiswardani

#### Tembusan:

- 1. Seskemensetnea
- 2. Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
- 4. Perguruan tinggi/Universitas Negeri seluruh Indonesia
- 5. Perguruan tinggi/Universitas Swasta seluruh Indonesia
- 6. Kedutaan Besar Singapura di Jakarta



Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327 Situs: www.setneg.go.id

-3-

Lampiran Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B- 21939 /Kemensetneg/Set/KTLN/LN.04.01/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017

#### Yth.

- 1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 2. Sekretaris Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- 3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 4. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 6. Sekretaris Jenderal, Dewan Perwakilan Daerah
- 7. Sekretaris Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat
- 8. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia
- 9. Sekretaris Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 10. Sekretaris Jenderal, Mahkamah Konstitusi
- 11. Sekretaris Jenderal, Komisi Yudisial
- 12. Sekretaris Jenderal, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
- 13. Sekretaris Jenderal, Badan Narkotika Nasional
- 14. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 15. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
- 16. Sekretaris Jenderal, Dewan Nasional Perubahan Iklim
- 17. Sekretaris Jenderal, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 18. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 19. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 20. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 21. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 22. Sekretaris Utama, Badan SAR Nasional
- 23. Sekretaris Utama, Badan Standardisasi Nasional
- 24. Sekretaris Utama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 25. Sekretaris Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 26. Sekretaris Utama, Arsip Nasional Republik Indonesia
- 27. Sekretaris Utama, Badan Informasi Geospasial
- 28. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 29. Sekretaris Utama, Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 30. Sekretaris Utama, Lembaga Ketahanan Nasional
- 31. Sekretaris Utama, Badan Intelijen Negara
- 32. Sekretaris Jenderal, Ombudsman Republik Indonesia
- 33. Sekretaris Kementerian Pariwisata, u.p. Asisten Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan
- 34. Sekretaris Jenderal, u.p. Dirkersin Ditjen Strahan, Kementerian Pertahanan



Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327 Situs: www.setneg.go.id

-4-

- 35. Sekretaris Utama, u.p. Direktur Kerja Sama, Badan Keamanan Laut
- 36. Sekretaris Jenderal, u.p Kepala Pusat Kerja Sama Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 37. Sekretaris Utama, u.p. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Sandi Negara
- 38. Sekretaris Jenderal, u.p Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 39. Sekretaris Ditjen Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian
- 40. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Sekretariat Negara
- 41. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 42. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 43. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 44. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- 45. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
- 46. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri
- 47. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 48. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 49. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 50. Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 51. Kepala Biro Umum, Kementerian Kesehatan
- 52. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan
- 53. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
- 54. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Komisi Pemilihan Umum
- 55. Kepala Biro Administrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
- 56. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 57. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 58. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Luar Negeri
- 59. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 60. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 61. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 62. Kepala Biro Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 63. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan
- 64. Kepala Badan Pengembangan SDM, Kementerian Perhubungan



Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327 Situs: www.setneg.go.id

-5-

- 65. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian
- 66. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial
- 67. Kepala Biro Umum, Badan Pemeriksa Keuangan
- 68. Kepala Biro Humas dan Protokol, Mahkamah Agung
- 69. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet
- 70. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- 71. Kepala Pusat Penerangan, Tentara Nasional Republik Indonesia
- 72. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 73. Direktur Utama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- 74. Direktur Utama, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- 75. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kepegawaian Negara
- 76. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- 77. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- 78. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- 79. Kepala Biro Umum dan Humas, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- 80. Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Pusat Statistik
- 81. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas, Badan Tenaga Nuklir Nasional
- 82. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol, Lembaga Administrasi Negara
- 83. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 84. Kepala Biro Umum, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- 85. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 86. Direktur Grup Manajemen Resiko dan Tata Kelola Dewan Gubernur, Bank Indonesia
- 87. Direktur Pengembangan SDM, Otoritas Jasa Keuangan
- 88. Direktur PT. Perusahaan Listrik Negara
- 89. Direktur PT. Kereta Api Indonesia
- 90. Direktur PT. Perumahan Nasional
- 91. Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, Pertamina
- 92. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Perusahaan Gas Negara
- 93. Direktur Keuangan dan SDM, Perumnas
- 94. Kepala Badan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
- 95. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

